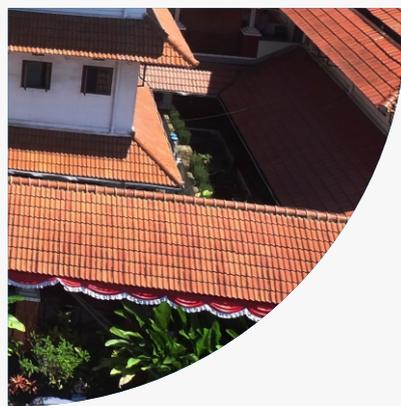




LKPJ

BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN

2021



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Ir.H. Juanda No.287 Bandung Telp. 2516061 Fax: 2510731
Website: <http://www.bappeda.jabarprov.go.id> email: bappeda@jabarprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran (ATA) 2021 ini dapat diselesaikan secara tepat waktu.

LKPJ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat ATA 2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ruang lingkup LKPJ ini meliputi hasil pelaksanaan kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan strategis yang ditetapkan, tindaklanjut Rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya serta penghargaan yang diraih pada Tahun 2021.

Secara prinsip penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan tetap dapat berjalan secara optimal dengan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan meskipun ditengah-tengah terjadinya bencana non alam pandemi COVID-19 serta terbitnya kebijakan-kebijakan untuk penanganan Pandemi COVID-19 di Jawa Barat. Keberhasilan ini diraih melalui efisiensi dan efektivitas kinerja yang dilakukan serta kerjasama dan partisipasi aktif dari seluruh komponen pemangku kepentingan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung perencanaan pembangunan di Jawa Barat.

Demikian Dokumen LKPJ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat ATA 2021 disusun sebagai wujud akuntabilitas penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Bandung, 22 Desember 2021

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Ir. FERRY SOFWAN ARIF, M.Si.
Pembina Utama Madya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	6
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	7
2.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	7
2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH..	8
2.3 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	10
2.4 KEBIJAKAN STRATEGIS	22
2.5 PENGHARGAAN	23
BAB III TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD PROVINSI JAWA BARAT ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020.....	25
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	30
BAB V PENUTUP.....	31

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAERAH.....	7
TABEL 2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	9
TABEL 2.3 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	13
TABEL 2.4 KEBIJAKAN STRATEGIS BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021	22
TABEL 2.5 PENGHARGAAN YANG DIRAIH BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021	24
TABEL 3.1 TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD PROVINSI JAWA BARAT ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Unit, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, meliputi perencanaan dan pengendalian, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Jawa Barat, serta menyelenggarakan dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Bappeda Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- b. Penyelenggaraan perencanaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- c. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Badan;
- d. Penyelenggaraan administrasi Badan;
- e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- f. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Bappeda Provinsi Jawa Barat menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran (ATA) 2021 meliputi hasil pelaksanaan kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan meliputi capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2021, kebijakan strategis yang diprakarsai serta tindak lanjut Rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.

Dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, Bappeda turut berperan aktif dalam menghadapi

tantangan paska penanganan virus COVID-19. Oleh sebab itu dalam program-program Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 ini diarahkan untuk berkontribusi terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi dampak COVID-19.

Selain tantangan dalam menghadapi pasca pandemi COVID-19 telah terbit perubahan kebijakan nasional melalui Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur perencanaan pada nomenklatur program dan kegiatan serta sub kegiatan untuk pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya Bappeda Provinsi Jawa Barat telah melakukan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan. Penyesuaian tersebut juga tercantum dalam Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan pada Tahun Anggaran 2021 secara prinsip dapat dilaksanakan dengan optimal. Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi dan wujud efisiensi serta efektivitas kinerja seluruh komponen pemangku kepentingan Bappeda Provinsi Jawa Barat yang tercermin dalam pencapaian target kinerja ditengah terjadinya Bencana Non Alam Pandemi COVID-19.

1.2 DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi Jawa Barat ATA 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

- 123);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

- Barat Tahun 2019 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 4);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 10);
 27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 77);
 28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penjabaran Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
 29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Unit, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 2);
 30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 59); dan
 31. Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 159).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2021 dimaksudkan untuk menyampaikan hasil penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 secara transparan dan akuntabel.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2021 ditujukan untuk mendukung pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Jawa Barat dalam Dokumen Utama LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat kepada DPRD Provinsi Jawa Barat.

BAB II
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Barat

Penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat sehingga target pencapaian pembangunan menjadi jelas dan terukur. Indikator kinerja utama (IKU) daerah dicapai dengan dukungan pencapaian Indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks tersebut, Bappeda Provinsi Jawa Barat merupakan perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah pada Misi Kelima yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota” pada sasaran “Terwujudnya Inovasi Tata Kelola Pemerintahan yang *Smart*, Bersih dan Akuntabel” dengan Indikator sasaran misi yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun uraian capaian Indeks Reformasi Birokrasi sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	A	BB*	Indeks Reformasi Birokrasi tercapai sesuai target yang ditetapkan. Kondisi Ini dapat dimaknai bahwa Hasil Evaluasi Kemenpan RB RI menunjukkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengalami kemajuan yang signifikan dan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
					Provinsi Jawa Barat dapat mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik.

Keterangan: *Capaian Tahun 2020

Pencapaian indikator sasaran pada misi kelima yang salah satunya ditunjukkan oleh Indeks Reformasi Birokrasi tercatat pada kategori BB (capaian tahun 2020) dari target kategori A yang ditetapkan. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa Hasil Evaluasi Kemenpan RB RI menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengalami kemajuan yang signifikan dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik.

Kontribusi Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi memiliki peran yang dominan terutama pada aspek area perubahan akuntabilitas. Hal ini didasari bahwa tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan secara langsung mendukung pencapaian target kinerja pada misi kelima pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat.

2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah 1.) Nilai komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi; 2.) Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat. Indikator tersebut merupakan parameter keberhasilan kinerja Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan. Adapun uraian Indikator Tingkat Konsistensi Perencanaan Jawa Barat sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Rumus Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Interpretasi Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nilai komponen perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi	[Nilai Perencanaan Strategis + Nilai Perencanaan Kinerja Tahunan (pada LKE AKIP)] / Bobot Perencanaan Kinerja * 100	Poin	28,00	N/A	Masih menunggu rilis Kemenpan RB
2.	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan Jawa Barat	$(\Sigma \text{ Program Nasional yang diakomodir dalam program pembangunan provinsi jawa barat} / \Sigma \text{ program nasional} \times 100) + (\Sigma \text{ program pada RKPD yang konsisten dengan program pada RPJMD} / \Sigma \text{ program pada RKPD} \times 100) + (\Sigma \text{ program pada RKPD Provinsi Jawa Barat yang diakomodir dalam seluruh Rencana Kerja Perangkat Daerah} / \Sigma \text{ program pada RKPD Provinsi Jawa Barat} \times 100) + (\Sigma \text{ prioritas RKPD Provinsi Jawa Barat yang diakomodir dalam RKPD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat} / (\Sigma \text{ prioritas pada RKPD Provinsi Jawa Barat} * \Sigma \text{ Kab/Kota se-Jawa Barat}) \times 100) / 4$	Persen	87,00	97,64	Tercapainya target indikator Tingkat Konsistensi Perencanaan Jawa Barat dapat dimaknai bahwa sinkronisasi perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan perencanaan pembangunan nasional dan kabupaten/kota dapat terwujud secara selaras dan bersinergi dengan sangat baik.

Nilai komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi belum dapat disajikan data capaiannya karena menunggu rilis indeks reformasi birokrasi dari Kemenpan RB. Sedangkan Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan Jawa Barat tercatat mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu tercapai sebesar 97,64 persen dari target sebesar 87,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Bappeda Provinsi Jawa Barat telah berkontribusi positif terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Tercapainya Tingkat Konsistensi Perencanaan Jawa Barat dapat dimaknai bahwa sinkronisasi perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan perencanaan pembangunan nasional dan kabupaten/kota dapat terwujud secara selaras dan bersinergi dengan sangat baik.

Ketercapaian IKU Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatas, tidak terlepas dari hasil perumusan proses bisnis secara jelas dan terukur yang menggambarkan strategi pencapaian kinerja melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Unit Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat sehingga dapat menunjang keberhasilan pencapaian IKU di tahun 2021.

2.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk akuntabilitas kinerja terhadap ketercapaian penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan. Melalui telaahan terhadap dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan hasil pengendalian yang dilakukan secara berkala serta memperhatikan isu-isu nasional dan global maka diperoleh rumusan program dan kegiatan yang terdiri dari 3 program, 13 kegiatan dan 64 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2021 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 masih dihadapkan pada *Pandemi Corona Virus Disease* (COVID-19) sehingga ditindaklanjuti melalui kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran maupun pengadaan barang dan jasa.

Upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung penanganan penanggulangan dan antisipasi dampak Pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap sektor keuangan daerah baik pada komponen Pendapatan Daerah maupun Belanja Daerah, Bappeda Provinsi Jawa Barat melakukan penyesuaian alokasi Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2021 dari alokasi murni sebesar Rp.100.263.588.416 diefisiensikan sebesar Rp.24.546.448.407 atau setara 24,48 persen sehingga menjadi Rp.75.717.140.009. Adapun program dan kegiatan tersebut diuraikan sebagaimana Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat	1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2059 Nomor 59); dan Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 159).	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	A	A	54.567.547.463	48.196.479.431									
					Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum pada Bappeda Provinsi Jawa Barat	Persen	100	100											
									Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen					100	100			
					1.1	1.1.1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Dokumen	5	5	3.236.304.201	3.165.754.234
						1.1.2			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun					Dokumen	7	7	1.439.874.923	1.389.623.723
						1.1.3			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD					Dokumen	1	1	37.800.000	34.700.000
						1.1.4			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Dokumen	1	1	14.500.000	10.250.000
						1.1.5			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD					Dokumen	1	1	51.575.000	49.605.000
						1.1.6			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD					Dokumen	1	1	14.350.000	9.680.000
						1.1.7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah					Dokumen	12	12	155.236.600	150.434.898
						1.1.8			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Dokumen	4	4	1.522.967.678	1.521.460.613
						1.2			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan yang tepat waktu					Dokumen	12	12	34.425.187.095	31.384.252.053
						1.2.1			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan					Dokumen	14	14	34.176.864.642	31.193.411.953
						1.2.2			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan					Dokumen	14	14	32.000.000	29.049.100
						1.2.3			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					Dokumen	12	12	12.500.000	10.575.000
						1.2.4			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi dan Keuangan SKPD					Dokumen	24	24	15.600.000	14.300.000
						1.2.5			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Keuangan Akhir Tahun					Dokumen	3	3	19.000.000	-
						1.2.6			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan					Dokumen	3	3	78.227.453	66.670.000
						1.2.7			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Dokumen	18	18	84.920.000	70.246.000
						1.2.8			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran					Dokumen	2	2	6.075.000	-
						1.3			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah					Orang	126	126	1.476.192.000	1.004.658.180
	1.3.1			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah dokumen Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dokumen	1	1	180.000.000	117.900.000									
	1.3.2			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	14	14	336.664.000	155.818.580									

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakanjnt Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.3.3			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	476.328.000	327.547.000			
	1.3.4			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah dokumen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dokumen	1	1	351.100.000	324.282.600			
	1.3.5			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen	1	1	132.100.000	79.110.000			
	1.4			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	Dokumen	12	12	5.680.395.821	4.989.263.412			
	1.4.1			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dokumen Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dokumen	1	1	206.627.000	193.405.760			
	1.4.2			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dokumen Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dokumen	1	1	274.346.396	241.754.600			
	1.4.3			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dokumen	1	1	547.957.425	379.354.350			
	1.4.4			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	1	1	156.580.000	136.560.000			
	1.4.5			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dokumen	1	1	4.494.885.000	4.038.188.702			
	1.5			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	405.098.000	348.418.440			
	1.5.1			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah dokumen pengadaan Aset Tetap Lainnya	Dokumen	1	1	405.098.000	348.418.440			
	1.6			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	24	24	6.557.991.602	4.894.218.154			
	1.6.1			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dokumen	12	12	1.412.250.800	1.060.006.940			
	1.6.2			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokumen	12	12	5.145.740.802	3.834.211.214			
	1.7			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	46	46	2.786.378.744	2.409.914.958			
	1.7.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dokumen	40	40	1.046.400.000	801.334.454			
	1.7.2			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Dokumen	6	6	1.739.978.744	1.608.580.504			
2				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rata-Rata Tingkat kesesuaian perencanaan antar waktu dan level pemerintahan	Persen	100	100	10.878.196.408	5.077.671.560			Evaluasi pencapaian kinerja dilakukan secara berkala melalui Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah terhadap seluruh perangkat Daerah. Tentunya untuk perangkat daerah Bidang Pemerintahan, Perekonomian, Keuangan, Pembangunan,

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakan/lanjutan Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													<p>Kesejahteraan Rakyat yang belum mampu mencapai target indikator kinerja terus diberikan masukan untuk perbaikan dan pencapaian kinerja yang lebih baik</p> <p>Tujuan dan Permasalahan yang diselesaikan, yaitu: Menjamin terlaksananya capaian kinerja Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan, Perekonomian, Keuangan, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan target yang telah ditetapkan</p>
2.1				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	19	19	6.652.076.140	2.231.667.786			<p>1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) berpedoman kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa penyusunannya sudah dimulai pada awal bulan desember tahun lalu (Kick Off Meeting), dilanjutkan dengan tahapan rancangan awal RKPD, kemudian rancangan RKPD, dan rancangan akhir RKPD, sampai ditetapkannya dokumen rancangan akhir RKPD menjadi RKPD pada bulan</p>

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													<p>juni dengan Peraturan Gubernur.</p> <p>Tujuan dan Permasalahan yang diselesaikan Penyusunan Dokumen RKPd secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>2. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, bahwa pada Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 tercantum program pembangunan daerah yang merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program strategis tersebut dilaksanakan sesuai Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 yang dijadikan landasan pelaksanaan program strategis dan dalam menentukan program prioritas daerah. Tujuan dan Permasalahan yang diselesaikan Perubahan</p>

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakan/lanjutan Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													RPJMD Tahun 2018-2023 sebagai landasan program prioritas pembangunan
				Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen	3	3	1.866.035.000	518.110.951			
				Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Telaahan Perencanaan Pembangunan Provinsi dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Dokumen	1	1	1.341.025.000	615.669.058			
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Berita Acara Konsultasi Publik	Dokumen	1	1	24.150.000	7.507.750			
				Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Dokumen Berita Acara Forum SKPD/Lintas SKPD	Dokumen	1	1	493.464.550	98.915.500			
				Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Dokumen Berita Acara Musrenbang Provinsi	Dokumen	1	1	606.644.590	350.083.176			
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen hasil koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Dokumen	12	12	2.320.757.000	641.381.351			
2.2				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah kewenangan provinsi yang dikelola dalam sistem informasi berbasis elektronik	Dokumen	3	3	1.310.602.098	1.046.372.243			Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengadakan forum satu data dengan menghadirkan Bappeda Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat serta mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Satu Data. Selain itu, Bappeda Provinsi Jawa Barat senantiasa melakukan koordinasi dengan Diskominfo dan BPS Provinsi Jawa Barat sebagai pengelola dan penyedia data statistik dasar yang berkualitas, sehingga data dan informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakanj Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Tujuan dan permasalahan yang diselesaikan Meningkatkan kualitas data dan informasi yang akurat dalam perencanaan pembangunan
					Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	729.040.578	613.738.965		
					Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Dokumen	1	1	92.693.000	83.200.000		
					Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	488.868.520	349.433.278		
	2.3				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan daerah	Dokumen	18	18	2.915.518.170	1.799.631.531		
					Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Dokumen	4	4	206.637.000	34.042.057		
					Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	12	12	2.498.713.170	1.761.436.974		
					Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	210.168.000	4.152.500		
3					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	10.271.396.138	8.069.629.818		
					Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsisten Dengan RPJMD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	100	100					
					Persentase Sasaran dan Program RKPD Yang Konsisten Dengan RPJMD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100	100					
	3.1				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	1	1	3.747.180.000	3.279.809.929		
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Dokumen	1	1	426.600.000	354.984.977		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakan lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
	3.1.2			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistinsi	Dokumen	1	1	161.438.000	161.040.000			
	3.1.3			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan triwulanan hasil monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dokumen	1	1	280.500.000	251.473.830			
	3.1.4			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah dokumen Perencanaan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat	Dokumen Dokumen	12 1	12 1	600.000.000 481.800.000	528.842.693 363.656.535			
	3.1.5			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	1	300.919.500	300.751.260			
	3.1.6			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diasistinsi	Dokumen	1	1	248.300.000	227.742.097			
	3.1.7			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	8	8	1.247.622.500	1.091.318.537			
	3.1.8			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Jumlah Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Jumlah Laporan Pelaksanaan kegiatan Komda Lansia Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Penurun Stunting Terintegrasi	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	24 1 1 1 1	24 1 1 1 1					
	3.2			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah laporan hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Dokumen	1	1	3.054.772.578	1.971.423.883			
	3.2.1			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah dokumen <i>background study</i> dokumen perencanaan bidang perekonomian	Dokumen Dokumen	1 18	1 18	1.881.282.850	1.132.877.243			
	3.2.2			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang diasistinsi	Dokumen	0	0	-				

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3.2.3			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan triwulanan hasil monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen	4	4	55.574.500	18.314.776			
	3.2.4			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen	24	24	169.602.400	124.872.810			
					Jumlah dokumen perencanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	Dokumen	1	1					
					Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan CSR	Dokumen	1	1					
					Jumlah dokumen ekonomi outlook	Dokumen	1	1					
	3.2.5			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah laporan hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Dokumen	1	1	643.552.800	491.633.644			
					Jumlah dokumen Background study dokumen perencanaan bidang SDA Provinsi Jawa Barat	Dokumen	1	1					
					Jumlah dokumen Sinergitas program Petani Milenial	Dokumen	1	1					
					Jumlah laporan Sinergitas program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	Dokumen	1	1					
	3.2.6			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam yang diasistensi	Dokumen	1	1	1.560.000	1.547.500			
	3.2.7			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan triwulanan hasil monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Dokumen	4	4	102.610.028	73.266.700			
	3.2.8			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Dokumen	12	12	200.590.000	128.911.210			
3.3				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan hasil koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	1	1	3.469.443.560	2.818.396.006			
	3.3.1			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dokumen	24	24	524.611.565	472.662.767			
					Jumlah dokumen <i>background study</i> dokumen perencanaan bidang Infrastruktur Provinsi Jawa Barat (lingkup Sumber Daya Air, Perumahan dan Kawasan Permukiman)	Dokumen	2	2					
					Jumlah dokumen <i>background study</i> dokumen perencanaan bidang Infrastruktur Provinsi Jawa Barat (lingkup Bina Marga dan Penataan Ruang serta Perhubungan)	Dokumen	1	1					

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Permasalahan	Solusi	Tindakanj Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3.3.2			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Infrastruktur yang diasistensi	Dokumen	1	1	137.662.000	78.448.546			
	3.3.3			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen	1	1	157.618.750	130.228.168			
	3.3.4			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan penyelenggaraan pengelolaan sistem irigasi partisipatif melalui Program <i>Integrated Participatory Development and Management of Irrigation</i> (IPDMIP)	Dokumen	1	1	557.657.232	507.423.481			
	3.3.5			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	12	12	1.572.420.985	1.196.578.010			
	3.3.6			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Kewilayahan yang diasistensi	Dokumen	0	0	-				
	3.3.7			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen triwulanan hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen	2	2	250.000.000	191.143.333			
					Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas	Dokumen	1	1					
					Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (PEP RAD GRK)	Dokumen	1	1					
	3.3.8			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen	1	1	269.473.028	241.911.701			
Jumlah									75.717.140.009	61.343.780.809			

2.4 Kebijakan Strategis

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari kebijakan strategis yang ditetapkan. Pada prinsipnya kebijakan strategis memiliki dampak secara luas terhadap masyarakat serta ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan perencanaan, pada tahun 2021 menginisiasi beberapa kebijakan strategis yang ditetapkan melalui peraturan kepala daerah maupun keputusan kepala daerah. Adapun kebijakan strategis dimaksud diuraikan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Kebijakan Strategis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomo 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.	Sinkronisasi perencanaan pembangunan sesuai perubahan yang mendasar dampak pandemi COVID-19 dan perubahan kebijakan nasional.
2	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.	Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.	Penyesuaian Perencanaan Pembangunan untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan daerah secara adaptif yang sesuai dengan perkembangan dan situasi kondisi terkini.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
3	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.	Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.	Landasan, arah dan prioritas pembangunan dalam rangka Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

2.5 Penghargaan

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat yang dilakukan dengan adanya sinergi dan kolaborasi bersama akademisi, pelaku usaha, masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya serta media, telah berhasil memperoleh penghargaan yang membanggakan. Berbagai prestasi telah ditorehkan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Adapun penghargaan yang diraih sebagaimana dimaksud diuraikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Penghargaan yang diraih Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/Biro Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi
1	2	3	4	5	6
1	Provinsi Terbaik Kedua “Penghargaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional”	Kementerian PPN/ Bappenas	Bappeda Provinsi Jawa Barat	Ruang DH 1-5 Bappenas Jalan Taman Suropati No.2 Tanggal 25 November 2021	

BAB III
TINDAKLANJUT REKOMENDASI DPRD PROVINSI JAWA BARAT ATAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR JAWA
BARAT AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran (ATA) 2020 yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat pada Jum'at, 26 Maret 2021 di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, dilakukan pendalaman dan pembahasan lebih lanjut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) III LKPJ ATA 2020. Pansus III LKPJ ATA 2020 memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pembahasan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan hasil pelaksanaan Tugas Pembantuan serta Penugasan yang dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2020.

Pembahasan Pansus III LKPJ ATA 2020 dilaksanakan dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah/Biro sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Utama LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2020. Hasil pembahasan Pansus III LKPJ 2020 diperoleh 66 rekomendasi yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 121.04/Kep.DPRD-11/2021. Untuk efektivitas penyusunan tindaklanjut Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2020, dibentuk Tim Penyusun Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 100/Kep.345- BAPP/2021 yang ditetapkan pada 2 Juli 2021.

Berdasarkan 66 rekomendasi yang diterbitkan oleh Pansus III LKPJ, terdapat 8 rekomendasi yang ditujukan kepada Bappeda Provinsi Jawa Barat yang telah ditindaklanjuti pada Tahun Anggaran 2021 maupun Tahun Anggaran 2022. Adapun tindaklanjut rekomendasi dimaksud diuraikan pada tabel 3.1.

Sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut ditindaklanjuti

sebagai bahan penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya serta penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan/atau kebijakan strategis kepala daerah lainnya.

Tabel 3.1
Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Barat Atas Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap perangkat daerah di bidang pemerintahan yang belum mampu mencapai target indikator kinerja.	Evaluasi pencapaian kinerja dilakukan secara berkala melalui Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah terhadap seluruh perangkat Daerah. Tentunya untuk perangkat daerah bidang pemerintahan yang belum mampu mencapai target indikator kinerja terus diberikan masukan untuk perbaikan dan pencapaian kinerja yang lebih baik.	Menjamin terlaksananya capaian kinerja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
2.	Melakukan upaya perbaikan dan pemantapan dokumen perencanaan pembangunan meliputi: Menyiapkan dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) lebih awal untuk dapat ditindaklanjuti sesuai jadwal.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) berpedoman kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa penyusunannya sudah dimulai pada awal bulan desember tahun lalu (<i>Kick Off Meeting</i>), dilanjutkan dengan tahapan rancangan awal RKPD, kemudian rancangan RKPD, dan rancangan akhir RKPD, sampai ditetapkannya dokumen rancangan akhir RKPD menjadi RKPD pada bulan juni dengan Peraturan Gubernur.	Penyusunan Dokumen RKPD secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
3.	Melakukan upaya perbaikan dan pemantapan dokumen perencanaan pembangunan meliputi: Menjadikan RPJMD perubahan tahun 2018-2023 sebagai dokumen perencanaan penyusunan program sesuai dengan kesepakatan program prioritas pembangunan.	Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, bahwa pada Perubahan RPJMD tahun 2018-2023 tercantum program pembangunan daerah yang merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program strategis tersebut dilaksanakan sesuai Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 yang dijadikan sebagai landasan pelaksanaan program strategis dan dalam menentukan program prioritas daerah.	Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 sebagai landasan program prioritas pembangunan
4.	Melakukan upaya perbaikan dan pemantapan dokumen perencanaan pembangunan meliputi: Meningkatkan kualitas data dan informasi yang akurat dan terkini sebagai basis pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan.	Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengadakan forum satu data dengan menghadirkan Bappeda Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat serta mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Satu Data. Selain itu, Bappeda Provinsi Jawa Barat senantiasa melakukan koordinasi dengan Diskominfo dan BPS Provinsi Jawa Barat sebagai pengelola dan penyedia data statistik dasar yang berkualitas, sehingga data dan informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen	Meningkatnya kualitas data dan informasi yang akurat dalam perencanaan pembangunan

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		perencanaan pembangunan daerah.	
5.	Melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap perangkat daerah di Bidang Perekonomian yang belum mampu mencapai target indikator kinerja.	Evaluasi pencapaian kinerja dilakukan secara berkala melalui Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah terhadap seluruh perangkat Daerah. Tentunya untuk perangkat daerah Bidang Perekonomian yang belum mampu mencapai target indikator kinerja terus diberikan masukan untuk perbaikan dan pencapaian kinerja yang lebih baik	Menjamin terlaksananya capaian kinerja Perangkat Daerah di Bidang Perekonomian sesuai dengan target yang telah ditetapkan
6.	Melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap perangkat daerah di bidang keuangan yang belum mampu mencapai target indikator kinerja.	Evaluasi pencapaian kinerja dilakukan secara berkala melalui Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah terhadap seluruh perangkat Daerah. Tentunya untuk perangkat daerah Bidang Keuangan yang belum mampu mencapai target indikator kinerja terus diberikan masukan untuk perbaikan dan pencapaian kinerja yang lebih baik	Menjamin terlaksananya capaian kinerja Perangkat Daerah di Bidang Keuangan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
7.	Melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap perangkat daerah di bidang pembangunan yang belum mampu mencapai target indikator kinerja	Evaluasi pencapaian kinerja dilakukan secara berkala melalui Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah terhadap seluruh perangkat Daerah. Tentunya untuk perangkat daerah Bidang Pembangunan yang belum mampu mencapai target indikator kinerja terus diberikan masukan untuk	Menjamin terlaksananya capaian kinerja Perangkat Daerah di Bidang Pembangunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan

No	Rekomendasi DPRD	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD (Program/ Kegiatan Dan Anggaran)	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
		perbaikan dan pencapaian kinerja yang lebih baik	
8.	Melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap perangkat daerah di bidang kesejahteraan rakyat yang belum mampu mencapai target indikator kinerja.	Evaluasi pencapaian kinerja dilakukan secara berkala melalui Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah terhadap seluruh perangkat Daerah. Tentunya untuk perangkat daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang belum mampu mencapai target indikator kinerja terus diberikan masukan untuk perbaikan dan pencapaian kinerja yang lebih baik	Menjamin terlaksananya capaian kinerja Perangkat Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan target yang telah ditetapkan

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN

Bappeda Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2021 tidak melaksanakan tugas pembantuan dan penugasan, baik berupa tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari tingkat pemerintahan di atasnya (Pemerintah Pusat) serta capaian tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya (Kabupaten/Kota).

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2021.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan pada Tahun Anggaran 2021 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen pemangku kepentingan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Jawa Barat yang telah mendukung agenda-agenda pembangunan daerah sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan kinerja perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Jawa Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian LKPJ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021, dengan harapan semoga kinerja perencanaan pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki dampak manfaat yang luas bagi segenap masyarakat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua untuk mewujudkan “JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI”.



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT